



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

Laporan Kinerja BPPMHKP Pontianak

Triwulan II 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja atas penggunaan anggaran. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Stasiun KIPM Pontianak pada Triwulan II Tahun 2025

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Pontianak Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan Stasiun KIPM Pontianak selama Triwulan II Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja SKIPM Pontianak Triwulan II Tahun 2025.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2025 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Pontianak, Juli 2025

Kepala Stasiun KIPM Pontianak



Jimmy Y. Elwaren

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis	4
1.4 Sistematika Penyajian	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1 Sasaran	7
2.2 Indikator dan Target Kinerja	8
2.3 Pengukuran Kinerja.....	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1 Capaian Kinerja.....	11
3.2 Analisis dan Evaluasi	13
3.3 Realisasi Anggaran	32
BAB IV. PENUTUP.....	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Rekomendasi.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja SKIPM Pontianak 2025	8
Tabel 2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Triwulan II 2025	11
Tabel 3 Target dan Realisasi IK 1	15
Tabel 4 Target dan Realisasi IK 2	16
Tabel 5 Target dan Realisasi IK 3	18
Tabel 6 Target dan Realisasi IK 4	20
Tabel 7 Target dan Realisasi IK 5	21
Tabel 8 Target dan Realisasi IK 6	22
Tabel 9 Target dan Realisasi IK 7	23
Tabel 10 Target dan Realisasi IK 8	24
Tabel 11 Target dan Realisasi IK 9	27
Tabel 12 Target dan Realisasi IK 10	28
Tabel 13 Target dan Realisasi IK 11	29
Tabel 14 Target dan Realisasi IK 12	30
Tabel 15 Target dan Realisasi IK 13	30
Tabel 16 Target dan Realisasi IK 14	31
Tabel 17 Realisasi Anggaran Triwulan II 2025	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	4
Gambar 2 Peta Strategis SKIPM Pontianak 2025	7
Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK	11

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) triwulan dua tahun 2025 merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak selama satu triwulan tahun 2025. Pada tahun 2025 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak mempunyai 3 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Awal Tahun 2025.

Untuk Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan termasuk berhasil, dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,08% berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id. Indikator Kinerja yang telah mencapai target pada Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut :

SK. 1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)
2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)
3. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak

SK. 3 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak
5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks)
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)
7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang di umumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)
8. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang pj Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja Tahun 2025 tiwulan II disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Stasiun KIPM Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2025 khususnya di triwulan II untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Pontianak. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Stasiun KIPM Pontianak serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Pontianak. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak, mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun KIPM Pontianak menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan; c) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain; d) pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; e) pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity); f) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; g) pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan

Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu; h) pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; i) pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; j) pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; k) pelaksanaan inspeksi, verifikasi,

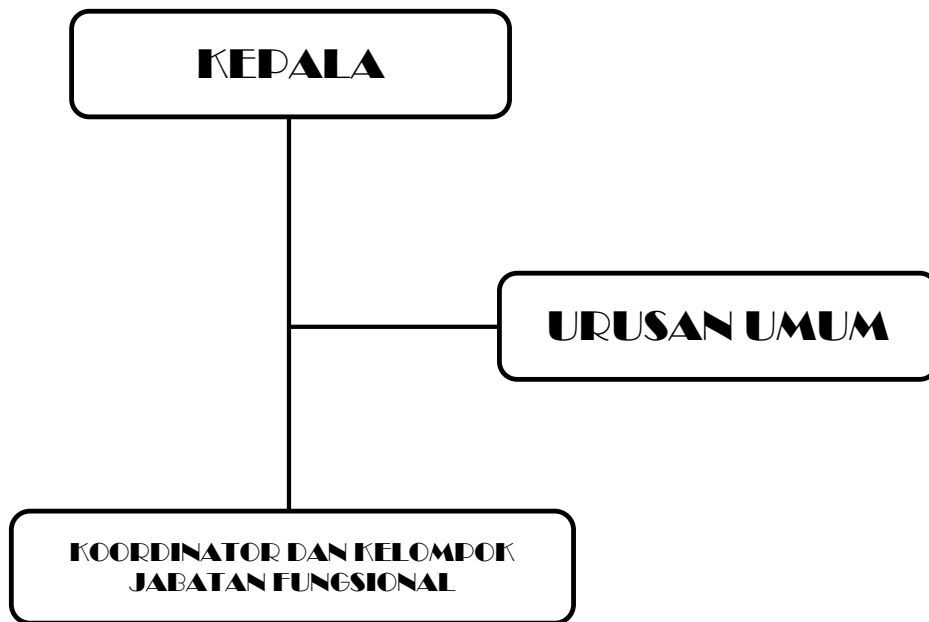
surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; l) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium; m) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; n) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut SJMHKP adalah Upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi Kesehatan manusia.

Salah satu fungsi utama BPPMHKP adalah pemberi Jaminan Kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemberian *Quality Assurance* terhadap industri dan perdagangan telah mendorong meningkatnya nilai tambah, daya saing, hilirisasi industri, pertumbuhan ekspor hasil kelautan dan perikanan dan investasi yang memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional. Berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, bahwa BPPMHKP merupakan unit Essselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Kegiatan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMHKP) dilakukan bertujuan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan mulai dari produksi primer (perikanan budidaya dan tangkap), pengolahan hingga distribusi hasil perikanan. Sesuai pasal 4 PERMEN KP No. 8 tahun 2024, menteri memberikan kewenangan kepada kepala Badan sebagai otoritas kompeten untuk melakukan pengendalian sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan dibidang perkarantinaan ikan, dengan susunan organisasi yang terdiri dari : a) Urusan Umum, b) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar. 1 Struktur Organisasi

1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Pontianak disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Pontianak adalah sebagai berikut:

- Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

- Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
- Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
- Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.

- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
- Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika dan penyajian LKJ Stasiun KIPM Pontianak Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

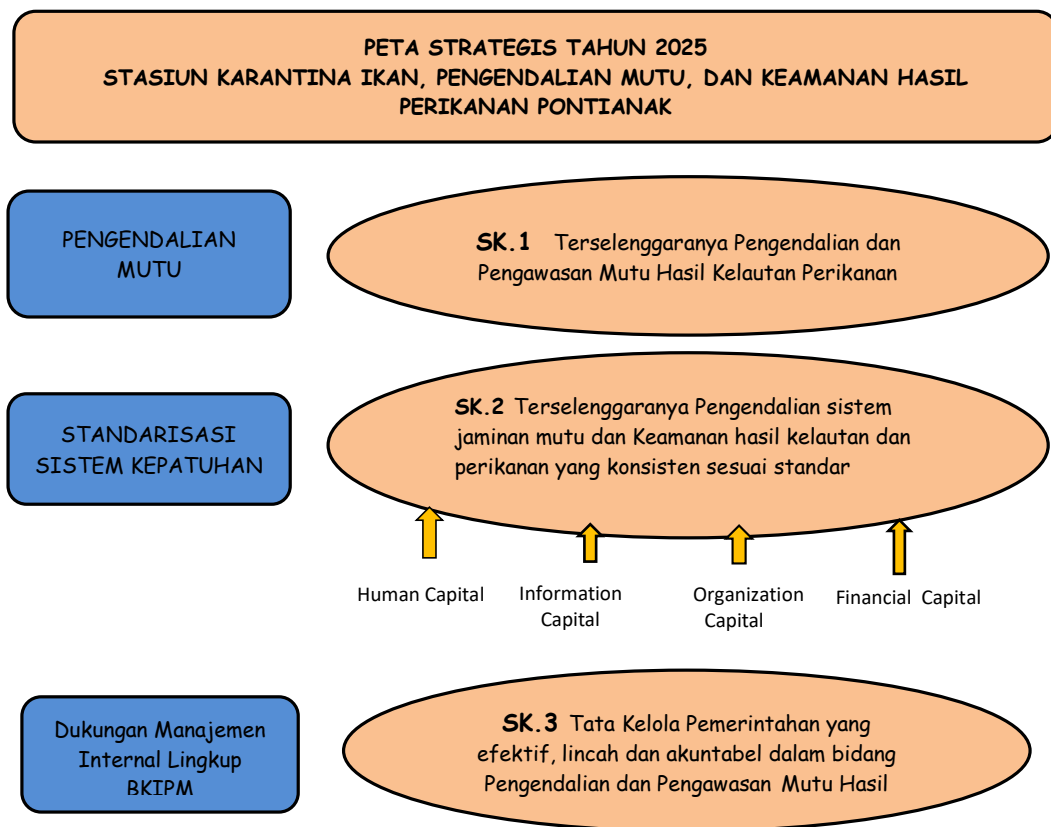
- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Pontianak tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 2 Peta Strategis SKIPM Pontianak 2025

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Pada Tahun 2025 Stasiun KIPM Pontianak mempunyai indikator dan target kinerja sebanyak 14, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel. 1 Indikator dan Target Kinerja Stasiun KIPM Pontianak 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70
		3	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	99
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan Keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	75
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	75
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	92
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	71,5
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	100
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks)	87
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	86
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	85

		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang di umumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	76
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	88

2.3 Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. angka maksimum adalah 120;
2. angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capain IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi Maximize
 Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU = Realisasi / Target x 100%
 - b. Polarisasi Minimize
 Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU = {(1 + (1 - Realisasi / Target)) x 100%
 - c. Polarisasi Stabilize
 Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



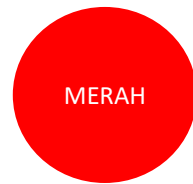
$100 \leq X \leq 120$

(memenuhi ekspektasi)



$80 \leq X < 100$

(Belum memenuhi ekspektasi)



$X < 80\%$

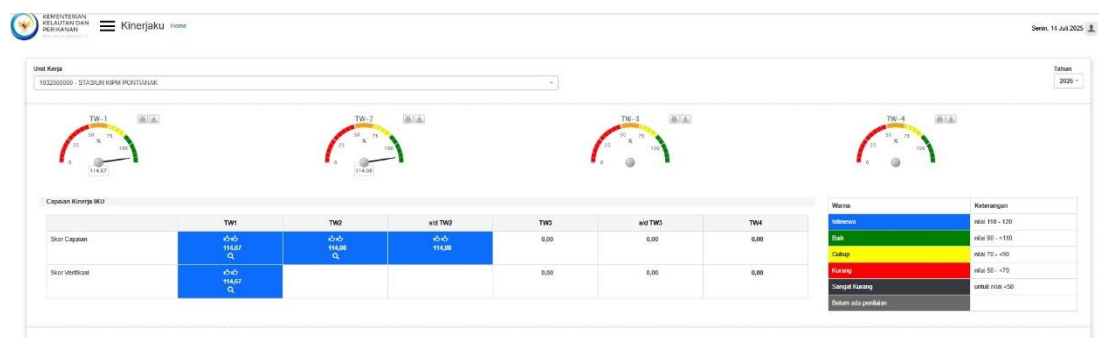
(tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Triwulan II Tahun 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **114,08** berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK

Rekapitulasi capaian kinerja BKIPM Pontianak Tahun 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel. 2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET TW II	REALISASI TW II
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu						
SK. 1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	70	100
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	70	100

		3	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	99	99	100
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK. 2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan Keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	75		
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	75		
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
SK. 3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	92	85	100
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	71,5		
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	100		
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks)	87	75	80,09
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai))	86		
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	85	85	100

		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	76	76	100
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	70	
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	88	88	97,08

3.2 Analisis dan Evaluasi

Kegiatan Pengendalian Mutu

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan adalah tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan lingkup UPT SKIPM Pontianak.

IK 1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)
--------------	---

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan

perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual

Pada Tahun 2025 TW II, Untuk IK 1 yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di Targetkan sebesar 70 %, Untuk IK 1 yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak sudah terealisasi 100%.

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{Xn} \times 100\%$$

% X	=	Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
A	=	Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB
B	=	Jumlah Unit menerapkan CPIB
C	=	Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
D	=	Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB
E	=	Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
F	=	Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal (1)
Xn	=	Jumlah dari unsur pembentuk (6)* (1)

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Tabel. 3 Target dan Realisasi IK 1

Indikator Kinerja	Realisasi	TW II 2025	
	2024	Target	Realisasi
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	100 %	70 %	100 %

IK 2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)
-------------	--

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga Pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius)
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada Tahun 2025 TW II, Untuk IK 2 yaitu Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di targetkan sebesar 70 %. Untuk IK 2 pada tahun 2025 ini UPT SKIPM Pontianak sudah mengeluarkan 3 sertifikat SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) Inspeksi dilakukan di UPI yaitu CV. DOLPHIN

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut

$$\begin{aligned} \%X &= \text{Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan kamanan pangan} \\ A &= \text{Persentase penerbitan sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup Produk} \\ B &= \text{Persentase SKP yang diterbitkan di unit pengolahan ikan skala UMKM dan menengah besar GMPSSOP (9)} \\ xn &= \text{Jumlah dari unsur pembentuk (9)} \end{aligned}$$

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\% \qquad \%X = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

untuk IK 2 yaitu Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak sudah terealisasi 100%.

Tabel. 4 Target dan Realisai IK 2

Indikator Kinerja	Realisasi	TW II 2025	
	2024	Target	Realisasi
Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	100 %	70 %	100 %

IK 3**Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak**

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pada Tahun 2025 TW II, Untuk IK 3 yaitu Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di targetkan sebesar 99% pada tahun 2025 Triwulan II tidak ada penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan ke negara tujuan ekspor dengan jumlah sertifikat yang di terbitkan sebanyak 43 sertifikat, dikarenakan tidak ada penolakan untuk IK 3 yaitu Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak terealisasi 100%

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$X \frac{A-B}{A} \times 100 \%$$

- | | | |
|---|---|--|
| X | = | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspopr (%) |
| A | = | HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP (52) |
| B | = | Jumlah HC yang ditolak oleh negara lain (o) |

$$X = \frac{A-B}{A} \times 100 \%$$

$$X = \frac{43-0}{43} \times 100\% = 100 \%$$

Pada Tahun 2025 TW II, Untuk IK 3 yaitu Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak sudah terealisasi 100 %.

Tabel. 5 Target Dan Realisasi IK 3

Indikator Kinerja	Realisasi	TW II 2025	
	2024	Target	Realisasi
Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	100 %	99 %	100 %

Kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

Sasaran Strategi 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar.

Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar menjadi tolak ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar (Kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan) lingkup UPT SKIPM Pontianak

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif
3. Persyaratan Umum
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya
6. Persyaratan Proses
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Tahun 2025 TW II, Untuk IK 4 yaitu Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai) belum ditargetkan dan belum terealisasi di karenakan untuk IK ini frekuensi perhitungannya Tahunan.

Tabel. 6 Target Dan Realisasi IK 4

Indikator Kinerja	Realisasi	TW II 2025	
	2024	Target	Realisasi
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	83,10	-	-

IK 5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)
-------------	---

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Umum
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Tahun 2025 TW II, Untuk IK 5 yaitu Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga Inpeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai) belum ditargetkan dan belum terealisasi di karenakan untuk IK ini frekuensi perhitungannya Tahunan.

Tabel. 7 Target Dan Realisasi IK 5

Indikator Kinerja	Realisasi	TW II 2025	
	2024	Target	Realisasi
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga Inpeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	83,10	-	-

IK 6	Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)
-------------	---

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Pada tahun 2025 TW II untuk IK 6 Yaitu Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai) sebesar 85 dan sudah terealisasi sebesar 100.

Tabel. 8 Target Dan Realisasi IK 6

Indikator Kinerja	Realisasi	TW II 2025	
	2024	Target	Realisasi
Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	92,5	85	100

Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Sekretariat BKIPM berasal dari satu sasaran strategis, yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM.

Sasaran Strategi 3. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak.

IK 7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)
-------------	--

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek

Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- 1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- 2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
- 3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
- 4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- 5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Persentase tindak lanjut atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern.

Pada tahun 2025 TW II untuk IK 7 yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai) belum ditargetkan dan belum terealisasi dikarenakan frekuensi perhitungannya tahunan.

Tabel. 9 Target Dan Realisasi IK 7

Indikator Kinerja	Realisasi	TW II 2025	
	2024	Target	Realisasi
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	91,39	-	-

IK 8

Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan

pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Pada Tahun 2025 TW II IK 8 yaitu Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) belum ditargetkan dan belum terealisasi dikarenakan frekuensi perhitungannya tahunan.

Tabel. 10 Target Dan Realisasi IK 8

Indikator Kinerja	Realisasi	TW II 2025	
	2024	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	100 %	-	-

IK 9 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks)

Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi (Renstra BKN 2015– 2019). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indek profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari

beberapa indikator output yang bersifat independen (Sutiadi, 2016: 56). Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian suatu program. Penyusunan indikator indeks sangat bergantung pada kekuatan teori atas tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan indikator berdasarkan teori yang dibangun akan menyempurnakan indeks, sehingga akan lebih mendekati kesesuaian. Semakin banyak komponen output yang tersedia, maka akan semakin mendekatkan penilaian pada kondisi yang sesungguhnya.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercemin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis sebagai berikut
$$IdxPro = koef(1 - gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 - \delta S1) + Koef(1 - inDiscpl)$$
 Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten Kj : Angka SKP $\delta S1$: Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%), inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin. Pada kenyataannya sering terjadi teori yang dibangun sudah sangat baik, namun data yang dibutuhkan kurang tersedia. Ketidaktersediaan data dapat terjadi secara permanen dimana data belum dikumpulkan secara parsial seperti tidak tersedia pada setiap tahun, atau waktu pengambilan data tidak sesuai dengan harapan. Ketidaktersediaan data permanen dapat diatasi melalui penggunaan data proxy dengan memperhatikan data-data sejenis atau data yang berhubungan dengan output sebagaimana diharapkan. Penggunaan data proxy dapat menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi, namun demikian deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidaktersediaan data yang parsial dapat juga menjadikan indeks komposit yang dibangun menjadi kurang reliable karena terdapat data yang tidak terisi. Hal ini karena nilai yang diperoleh merupakan kekosongan angka yang telah dikalikan dengan angka koefisien yang telah ditetapkan. Akibatnya, hasil penghitungan mengalami deviasi menjauh dari nilai validitas yang diharapkan dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin. Premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin meningkat, penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai yang tinggi. Adapun data-data yang dapat digunakan untuk menghitung indeks profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti; Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data hukuman pegawai.

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai. Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggarananya semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan integritas.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pada Tahun 2025 TW II, Untuk IK 9 yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks) ditargetkan sebesar 75, untuk IK ini sudah terealisasi sebesar 80,09

Tabel. 11 Target Dan Realisasi IK 9

Indikator Kinerja	Realisasi	TW II 2025	
	2024	Target	Realisasi
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks)	83,06	75	80,09

IK 10 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja

(15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

Pada Tahun 2025 TW II IK 10 yaitu Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai) belum ditargetkan dan belum terealisasi dikarenakan frekuensi perhitungannya tahunan.

Tabel. 12 Target Dan Realisasi IK 10

Indikator Kinerja	Realisasi	TW II 2025	
	2024	Target	Realisasi
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	83,7	-	-

IK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

CARA PENGUKURAN

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

Pada Tahun 2025 TW II, IK 11 yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) ditergetkan sebesar 85 % dan untuk ini sudah terealisasi sebesar 100%

Tabel. 13 Target Dan Realisasi IK 11

Indikator Kinerja	Realisasi	TW II 2025	
	2024	Target	Realisasi
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	100 %	85 %	100 %

IK 12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)
--------------	---

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. RUP telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30%)

Pada Tahun 2025 TW II, IK 12 yaitu Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di targetkan sebesar 76%. Untuk IK 12 ini sudah terealisasi sebesar 100%.

Tabel. 14 Target Dan Realisasi IK 12

Indikator Kinerja	Realisasi	TW II 2025	
	2024	Target	Realisasi
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	84,34 %	76 %	100 %

IK 13	Persentase Pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)
--------------	--

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Pada Tahun 2025 TW II, IK 13 yaitu Persentase Pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) belum ditargetkan dan belum terealisasi dikarenakan frekuensi perhitungannya tahunan.

Tabel. 15 Target Dan Realisasi IK 13

Indikator Kinerja	Realisasi	TW II 2025	
	2024	Target	Realisasi
Persentase Pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	-	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisio

Pada Tahun 2025 TW II, IK 14 yaitu Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai) ditargetkan sebesar 88, untuk IK 14 ini sudah terealisasi sebesar 97,08 %

Tabel. 16 Target Dan Realisasi IK 14

Indikator Kinerja	Realisasi	TW II 2025	
	2024	Target	Realisasi
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	98,85	88	97,08

3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran SKIPM Pontianak pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar Rp. 8,073,187,000. Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Pontianak pada tahun 2025 TW II baru sebesar Rp. 2,838,430,518 atau sebesar 35.16 %.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I PONTIANAK

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 06

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	032-567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	042	PAGU	4,490,112,000	3,583,075,000	0	0	0	0	0	0	0	8,073,187,000
				REALISASI	1,906,227,839	932,202,679	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,838,430,518
				PERSENTASE	(42.45%)	(26.02%)								(35.16%)
				SISA	2,583,884,161	2,650,872,321	0	0	0	0	0	0	0	5,234,756,482
				TOTAL	4,490,112,000	3,583,075,000	0	0	0	0	0	0	0	8,073,187,000
				REALISASI	1,906,227,839	932,202,679	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	2,838,430,518
				PERSENTASE	(42.45%)	(26.02%)								(35.16%)
				SISA	2,583,884,161	2,650,872,321	0	0	0	0	0	0	0	5,234,756,482

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)

Tabel. 17 Realisasi Anggaran TW II

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja UPT Stasiun KIPM Pontianak Tahun 2025 menyajikan keberhasilan dan Kegagalan, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama. Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Tahun 2025 Triwulan II sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,08 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Dari 14 Indikator Kinerja terdapat 8 (57,14%) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target, dan 6 (42,86%) Indikator kinerja yang belum mencapai target karena di targetkan pada triwulan berikutnya.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Pontianak pada tahun 2025 triwulan II, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan, triwulan, semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.
- Mengingat Indikator Kinerja terkait dengan IP ASN, ditargetkan per semester, agar pemenuhan aspek-aspek IP ASN Pegawai lebih ditingkatkan, agar hasilnya dapat sesuai target.

Lampiran

IK 1.

**Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi
Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan
Lingkup UPT Stasiun KIDM Pontianak (%)**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 812000493066900170003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PULAUMAS KHATULISTIWA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120004930669 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Khatulistiwa KM. 6, Desa/Kelurahan Batulayang, Kec. Pontianak Utara,
Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos: 78244 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Asing (PMA) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 03252 - Pembenihan Ikan Air Payau Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : Dusun Tanjung Gundul Desa/Kelurahan Karimunting, Kec. Sungai Raya
Kepulauan, Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos: 79273 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 23 Mei 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 812000493066900170003

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : ID-CPIB-P-61-250030 |
| 2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan | : Dusun Tanjung Gundul |
| 3. Komoditas | : Benih Udang Vanamei |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : BAIK |

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



IK 2.

**Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi
Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Lingkup
UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:912021901245400020003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha
<i>Company Name</i> | : CV DOLPHIN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Registration Number</i> | : 9120219012454 |
| 3. Alamat Kantor
<i>Office Address</i> | : Jl. Khatulistiwa KM 6, No. 602,
Desa/Kelurahan Batulayang, Kec. Pontianak
Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan
Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78244 |
| 4. Status Penanaman Modal
<i>Investment Status</i> | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<i>Domestic Direct Investment</i> |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
<i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i> | : 10216 - Industri Berbasis Daging Lumatan
Dan Surimi
<i>10216 - Minced Meat and Surimi Based
Industry</i> |
| 6. Lokasi Usaha
<i>Business Location</i> | : Jl. Khatulistiwa, KM 6, No. 602
Desa/Kelurahan Batulayang, Kec. Pontianak
Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan
Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78244 |

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 09 April 2025
Issued date : 09 April 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 10 April 2025
Printed date : 10 April 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 912021901245400020003

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00038464
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 36396/61/SKP/SR/IV/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : CV. DOLPHIN
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Bakso Ikan Dengan Wortel
Fish Ball With Carrot
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Pengolahan, Perebusan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Processing, Cooking, Freezing,
Packing/Labelling, Cold Storing, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : B

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 09 April 2025
09 April 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 09 April 2027
09 April 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:912021901245400020002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha
<i>Company Name</i> | : CV DOLPHIN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Registration Number</i> | : 9120219012454 |
| 3. Alamat Kantor
<i>Office Address</i> | : Jl. Khatulistiwa KM 6, No. 602,
Desa/Kelurahan Batulayang, Kec. Pontianak
Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan
Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78244 |
| 4. Status Penanaman Modal
<i>Investment Status</i> | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<i>Domestic Direct Investment</i> |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
<i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i> | : 10216 - Industri Berbasis Daging Lumatan
Dan Surimi
<i>10216 - Minced Meat and Surimi Based
Industry</i> |
| 6. Lokasi Usaha
<i>Business Location</i> | : Jl. Khatulistiwa, KM 6, No. 602
Desa/Kelurahan Batulayang, Kec. Pontianak
Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan
Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78244 |

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 09 April 2025
Issued date : 09 April 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 10 April 2025
Printed date : 10 April 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 912021901245400020002

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00038465
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 36397/61/SKP/SR/IV/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : CV. DOLPHIN
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Bakso Ikan
Fish Ball
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Pengolahan, Perebusan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Processing, Cooking, Freezing,
Packing/Labelling, Cold Storing, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : B

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 09 April 2025
09 April 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 09 April 2027
09 April 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:912021901245400020004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha
<i>Company Name</i> | : CV DOLPHIN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Registration Number</i> | : 9120219012454 |
| 3. Alamat Kantor
<i>Office Address</i> | : Jl. Khatulistiwa KM 6, No. 602,
Desa/Kelurahan Batulayang, Kec. Pontianak
Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan
Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78244 |
| 4. Status Penanaman Modal
<i>Investment Status</i> | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<i>Domestic Direct Investment</i> |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
<i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i> | : 10216 - Industri Berbasis Daging Lumatan
Dan Surimi
<i>10216 - Minced Meat and Surimi Based
Industry</i> |
| 6. Lokasi Usaha
<i>Business Location</i> | : Jl. Khatulistiwa, KM 6, No. 602
Desa/Kelurahan Batulayang, Kec. Pontianak
Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan
Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78244 |

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 09 April 2025
Issued date : 09 April 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 10 April 2025
Printed date : 10 April 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 912021901245400020004

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00038463
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 36395/61/SKP/LN/IV/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : CV. DOLPHIN
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Ikan Olahan Lapis Kulit Tahu / Ngohhiang Fish
Leather Layered Fish Tofu / Ngohhiang Fish
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Pengolahan, Penggorengan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Processing, Frying, Freezing,
Packing/Labelling, Cold Storing, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : B

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 09 April 2025
09 April 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 09 April 2027
09 April 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

IK 3.

**Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu
dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup
UDT Stasiun KIDM Pontianak**

**REKAP EKSPOR MUTU
STASIUN KIPM PONTIANAK TAHUN 2025**

NO.	NAMA UPI	PEMAKAIAN SERTIFIKAT/BULAN											
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
1	PT. PULAUMAS KHATULISTIWA	1	3	1	-	2	1						
2	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	6	11	10	9	16	10						
3	CV. ROBBY JAYA	10	9	1	-	3	2						
4	PERORANGAN TJHANG SE SU	-	-	-	-	-	-						
TOTAL		17	23	12	9	21	13						

Mengesahkan,
Kepala SKIPM Pontianak,



Jimmy Y. El Haron, S.St.Pi
NIP. 19770124 200502 1 001

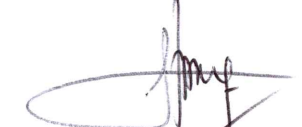
Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Mutu Pasca Panen



Dannie Patria Ratin, A.Md., S.Pi
NIP. 19791130 200502 1 002

Pontianak, 4 Juli 2025

Operator



Purnomo Putra, A.Md
NIP. 19870315 201402 1 003

IK 6.

**Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) lingkup
UPD Stasiun KIDM Pontianak (Nilai)**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1725/SJ.2/RC.610/VII/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025

Tanggal : 09 Juli 2025

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 2150/SJ.1/RC.610/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Triwulan II Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 10.00 WIB (sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 1444/SJ.2/TU.210/VI/2025 Tanggal 2 Juni 2025 hal Penetapan Target Indikator Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025).
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 sebesar 95,16 dari target nilai 84,00
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester I tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker lingkup KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup unit kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, dan Sinergi (SAILS)**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Tugas Pengawasan Pengendalian Kebijakan Program Prioritas KKP
3. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.04	87.71	100.00	100.00	98.62	100.00	95.16	100%	0.00	95.16
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.76	17.54	10.00	10.00	9.86	25.00				
			Nilai Aspek	92.52		96.58				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	93.73	98.04	100.00	100.00	100.00	100.00	98.67	100%	0.00	98.67
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	14.06	19.61	10.00	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	96.87		99.51				100.00				
2	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	92.28	98.44	100.00	100.00	98.08	100.00	98.34	100%	0.00	98.34
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.84	19.69	10.00	10.00	9.81	25.00				
			Nilai Aspek	96.14		99.13				100.00				
3	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	91.87	95.93	100.00	100.00	100.00	100.00	97.97	100%	0.00	97.97
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.78	19.19	10.00	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	95.94		98.98				100.00				
4	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	89.52	97.06	100.00	100.00	97.48	100.00	97.59	100%	0.00	97.59
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.43	19.41	10.00	10.00	9.75	25.00				
			Nilai Aspek	94.76		98.64				100.00				
5	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	83.58	99.76	100.00	100.00	97.71	100.00	97.26	100%	0.00	97.26
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.54	19.95	10.00	10.00	9.77	25.00				
			Nilai Aspek	91.79		99.37				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	81.30	100.00	100.00	100.00	100.00	97.20	100%	0.00	97.20	
			Bobot	10	15	20	10	10	10					25
			Nilai Akhir	10.00	12.20	20.00	10.00	10.00	10.00					25.00
			Nilai Aspek	90.65			100.00							100.00
7	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	83.71	97.99	100.00	100.00	99.52	97.11	100%	0.00	97.11	
			Bobot	10	15	20	10	10	10					25
			Nilai Akhir	10.00	12.56	19.60	10.00	10.00	9.95					25.00
			Nilai Aspek	91.86			99.38							100.00
8	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	80.29	70.13	100.00	100.00	98.09	90.88	100%	0.00	90.88	
			Bobot	10	15	20	10	10	10					25
			Nilai Akhir	10.00	12.04	14.03	10.00	10.00	9.81					25.00
			Nilai Aspek	90.15			92.06							100.00
9	03207	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	100.00	77.24	70.73	100.00	100.00	99.88	90.72	100%	0.00	90.72	
			Bobot	10	15	20	10	10	10					25
			Nilai Akhir	10.00	11.59	14.15	10.00	10.00	9.99					25.00
			Nilai Aspek	88.62			92.65							100.00



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	008	032	099325	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
2	024	032	649732	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
3	123	032	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
4	072	032	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

5	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
6	094	032	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
7	093	032	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
8	039	032	249169	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
9	014	032	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
10	023	032	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

11	021	032	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
12	034	032	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
13	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
14	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
15	106	032	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
16	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.29	100.00	50.00	50%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

17	042	032	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
18	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
19	012	032	109131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
20	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.93	100.00	79.99	80%	0.00	99.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.97				100.00				
21	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.68	100.00	79.97	80%	0.00	99.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.84				100.00				
22	017	032	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.47	100.00	99.95	100%	0.00	99.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.87				100.00				

IK 9.

Indeks Profesionalitas ASN lingkupp UPT Stasiun KIDM Pontianak (Indeks)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1105/SJ.3/TU.140/VII/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal
4. Para Sekretaris Badan

Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

Hal : Capaian IKU IP ASN Semester I Tahun 2025

Tanggal : 8 Juli 2025

Dalam rangka monitoring capaian IKU Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester I Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- nilai IP ASN KKP per 7 Juli 2025 pada Dashboard IP ASN KKP melalui domain <https://ipasn.sdmao.id/> sebesar 82,09 (kategori tinggi), terdiri dari:
 - kualifikasi sebesar 22,48;
 - kompetensi sebesar 29,11;
 - kinerja sebesar 25,50;
 - disiplin sebesar 4,99.
- distribusi nilai IPASN KKP berdasarkan capaian pada unit organisasi sebagai berikut:

No.	Unor	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total	Ket
1)	Setjen	22,59	31,10	26,12	5	84,81	Tinggi
2)	DJPRL	23,17	27,54	25,13	5	80,85	Sedang
3)	DJPK	22,33	31,50	26,23	4,99	85,05	Tinggi
4)	DJPT	22,56	30,42	26,78	5	84,76	Tinggi
5)	DJPB	22,08	29,29	25,64	5	82,02	Tinggi
6)	DJPDSPKP	23,34	28,38	25,17	5	81,89	Tinggi
7)	DJPSDKP	22,75	29,67	25,07	4,99	82,48	Tinggi
8)	ITJEN	22,33	29,33	24,71	5	81,36	Tinggi
9)	BPPSDMKP	22,37	27,84	25,16	4,99	80,36	Sedang
10)	BPPMHKP	22,68	30,24	25,10	4,98	83,00	Tinggi

- pengukuran nilai IP ASN KKP terintegrasi dengan peremajaan data pada aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN dengan memperhatikan penyesuaian bobot dimensi sebagaimana lampiran surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 tanggal 20 Juni 2024.
- peremajaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi MyASN masing-masing pegawai diperlukan sebagai salah satu dimensi yang mempengaruhi nilai capaian IP ASN, terdapat perubahan perhitungan komponen diklat 20 JP yang dihitung secara proporsional pada saat pegawai melakukan *update* data riwayat sertifikasi di menu "kursus" dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai.

5. **batas akhir** penghitungan nilai capaian IP ASN Semester I Tahun 2025 pada tanggal **10 Juli 2025** dapat dipantau melalui dashboard <https://ipasn.sdmao.id/> selanjutnya digunakan sebagai nilai realisasi IKU IP ASN organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dida Daniarsyah

IK 11.

**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan
untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIDM
Pontianak (%)**

Tuntas	: 42 Rekom
Proses	: 0 Rekom
Pending	: 0 Rekom
RTDD	: 0 Rekom

IK 12.

**Persentase rencana umum pengadaan DBJ yang di umumkan
pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIDM Pontianak (%)**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 86/SJ.7/PL.410/VII/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 9 Juli 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 148 Satuan kerja (satker) yang tersebar di 10 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 09.30 WIB, masih terdapat 2 (dua) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100% (seratus persen), yang disebabkan oleh adanya LEBIH TERUMUMKAN dan BELUM MENGUMUMKAN di dalam aplikasi SIRUP (sebagaimana terlampir), antara lain;

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus persentase 0,00%

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya**

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya persentase 100,81%

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara dapat segera melakukan koreksi perbaikan terhadap persentase tersebut agar menjadi persentase wajar.

Demikian kami sampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Sofiyanto

Ditandatangani
Secara Elektronik

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 86/SJ.7/PL.410/VII/2025
 Tanggal : 9 Juli 2025

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
 PENGADAAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode Eselon 1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 2	% Capaian Target IKU TW 2	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	42,481,346,722	42,481,346,722	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektorat Jenderal	1	5,933,654,000	5,933,654,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	31,003,797,075	31,003,797,075	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	233,805,135,000	233,805,135,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	312,817,524,500	312,817,524,500	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	334,777,219,000	334,777,219,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	41	162,785,749,168	162,785,749,168	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	1,978,583,640,800	1,975,572,149,800	(3,011,491,000)	Kurang Terumumkan	76.00%	99.85%	Melebihi Target
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,022,674,212,069	1,029,924,292,069	7,250,080,000	Lebih Terumumkan	76.00%	99.29%	Melebihi Target

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

C	DITJEN PERIKANAN TANGKAP		1,978,583,640,800	1,975,572,169,800	1,975,572,149,800	3,011,491,000	99.85%
1	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	15,972,735,000	15,972,735,000	15,972,735,000	-	100.00%
2	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	219,592,991,000	219,592,991,000	219,592,991,000	-	100.00%
3	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	3,685,697,000	3,685,697,000	3,685,697,000	-	100.00%
4	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	435,112,613,000	435,112,613,000	435,112,613,000	-	100.00%
5	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	3,940,604,800	3,940,604,800	3,940,604,800	-	100.00%
6	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,949,994,000	4,949,994,000	4,949,994,000	-	100.00%
7	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	1,922,347,000	1,922,347,000	1,922,347,000	-	100.00%
8	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,003,286,000	2,003,286,000	2,003,286,000	-	100.00%
9	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	3,196,346,000	3,196,346,000	3,196,346,000	-	100.00%
10	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	6,498,030,000	6,498,030,000	6,498,030,000	-	100.00%
11	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	2,877,458,000	2,877,458,000	2,877,458,000	-	100.00%
12	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	3,011,491,000	3,011,491,000	-	3,011,491,000	0.00%
13	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,200,792,000	2,200,792,000	2,200,792,000	-	100.00%
14	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,089,461,000	2,089,461,000	2,089,461,000	-	100.00%
15	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	59,313,949,000	59,313,949,000	59,313,949,000	-	100.00%
16	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	36,040,719,000	36,040,719,000	36,040,719,000	-	100.00%
17	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1,959,181,000	1,959,181,000	1,959,181,000	-	100.00%
18	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	3,708,065,000	3,708,065,000	3,708,065,000	-	100.00%
19	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	-	100.00%
20	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	2,806,316,000	2,806,316,000	2,806,316,000	-	100.00%
21	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	3,195,671,000	3,195,671,000	3,195,671,000	-	100.00%
22	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,874,832,000	1,874,832,000	1,874,832,000	-	100.00%
23	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	1,215,163,000	1,215,163,000	1,215,163,000	-	100.00%
24	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	2,884,668,000	2,884,668,000	2,884,668,000	-	100.00%

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

D	DITJEN PERIKANAN BUDI DAYA		1,022,674,212,069	1,029,878,925,069	1,029,924,292,069	(7,250,080,000)	100.71%
1	632462	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	893,006,650,069	900,256,730,069	900,256,730,069	(7,250,080,000)	100.81%
2	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	41,051,068,000	41,005,701,000	41,051,068,000	-	100.00%
3	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	11,611,482,000	11,611,482,000	11,611,482,000	-	100.00%
4	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	6,382,408,000	6,382,408,000	6,382,408,000	-	100.00%
5	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	7,843,216,000	7,843,216,000	7,843,216,000	-	100.00%
6	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	4,855,811,000	4,855,811,000	4,855,811,000	-	100.00%
7	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	8,938,057,000	8,938,057,000	8,938,057,000	-	100.00%
8	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	8,049,166,000	8,049,166,000	8,049,166,000	-	100.00%
9	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	5,836,021,000	5,836,021,000	5,836,021,000	-	100.00%
10	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	3,033,050,000	3,033,050,000	3,033,050,000	-	100.00%
11	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	7,414,717,000	7,414,717,000	7,414,717,000	-	100.00%
12	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	6,743,509,000	6,743,509,000	6,743,509,000	-	100.00%
13	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	7,324,563,000	7,324,563,000	7,324,563,000	-	100.00%
14	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	1,253,261,000	1,253,261,000	1,253,261,000	-	100.00%
15	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,982,403,000	3,982,403,000	3,982,403,000	-	100.00%
16	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	5,348,830,000	5,348,830,000	5,348,830,000	-	100.00%



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sofiyanto

IK 14.

**Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIDM
Pontianak (Nilai)**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B. 3095/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2025 10 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Target yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2025 adalah 88, sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM:

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan II Tahun 2025 adalah **94,42** dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat **3,78** dan mutu pelayanan diperoleh **"A"** kategori **"Sangat Baik"**. Berikut merupakan tabel perolehan tiap unsur pelayanan.
2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) UPP, dan 1 (satu) UPP mendapatkan kategori baik. UPT SKIPM Padang, SKIPM Merak, dan SKIPM Pekanbaru memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah dari total 47 UPT adalah SKIPM Tanjung Balai Asahan, SKIPM Aceh, dan SKIPM Mamuju.

3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 14 layanan terdapat 13 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 1 layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (87,50).
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur	Nilai
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	94,92
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	94,88
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	94,02
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	94,87
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	94,77
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	93,37
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	93,72
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	95,51
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	93,68

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 (Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 3095/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2025

Tanggal : 10 Juli 2025

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hari Maryadi

Rekapitulasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
1	Stasiun KIPM Padang	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A	Sangat Baik	10
2	Stasiun KIPM Merak	99.73	99.73	100.00	99.73	99.19	100.00	99.73	99.73	100.00	99.76	A	Sangat Baik	93
3	Stasiun KIPM Pekanbaru	99.51	99.51	99.51	98.04	99.51	98.04	99.02	99.02	98.04	98.91	A	Sangat Baik	51
4	Stasiun KIPM Gorontalo	98.31	98.99	98.65	98.65	98.31	98.31	98.65	98.65	98.65	98.57	A	Sangat Baik	74
5	Balai KIPM Banjarmasin	98.89	98.58	98.26	98.10	98.42	98.42	98.58	98.58	98.58	98.49	A	Sangat Baik	158
6	Balai KIPM Ambon	99.00	99.33	97.67	97.33	98.67	98.33	98.33	99.00	98.33	98.44	A	Sangat Baik	75
7	Stasiun KIPM Sorong	99.60	99.19	98.79	89.52	100.00	98.79	99.19	100.00	97.98	98.12	A	Sangat Baik	62
8	Balai KIPM Jayapura	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	A	Sangat Baik	9
9	Stasiun KIPM Pontianak	99.12	97.37	98.68	97.81	99.12	95.18	94.74	95.61	96.05	97.08	A	Sangat Baik	57
10	Balai KIPM Medan I	97.06	97.06	97.06	96.32	97.06	96.32	97.06	97.79	97.06	96.98	A	Sangat Baik	34
11	Balai KIPM Jakarta II	97.45	97.96	96.43	96.94	95.92	97.45	97.45	97.45	95.41	96.94	A	Sangat Baik	49
12	Stasiun KIPM Merauke	95.59	97.06	94.12	94.12	97.06	98.53	97.06	100.00	98.53	96.90	A	Sangat Baik	17
13	Balai KIPM Tanjung Pinang	96.96	95.75	96.56	97.27	96.26	95.55	95.14	97.87	96.46	96.42	A	Sangat Baik	247
14	Stasiun KIPM Ternate	96.30	96.30	96.30	96.30	96.30	95.37	95.37	96.30	96.30	96.09	A	Sangat Baik	27

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
15	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	96.32	96.32	96.32	95.59	95.59	95.59	95.59	97.06	96.32	96.08	A	Sangat Baik	34
16	Balai KIPM Balikpapan	96.25	96.25	96.25	95.63	95.63	95.00	95.94	96.25	95.63	95.87	A	Sangat Baik	80
17	Balai KIPM Surabaya II	98.42	97.97	97.97	98.42	97.52	95.72	95.50	98.65	82.43	95.85	A	Sangat Baik	111
18	Stasiun KIPM Jambi	97.56	94.51	96.95	96.95	96.34	90.85	93.90	97.56	96.34	95.66	A	Sangat Baik	41
19	Balai KIPM Mataram	96.55	96.55	95.69	96.98	94.83	94.40	94.40	96.12	94.83	95.59	A	Sangat Baik	58
20	Balai KIPM Entikong	95.63	96.88	96.25	95.00	95.63	93.13	94.38	96.25	95.00	95.35	A	Sangat Baik	40
21	Stasiun KIPM Palu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	78.41	100.00	78.41	95.20	A	Sangat Baik	22
22	Stasiun KIPM Tahuna	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	A	Sangat Baik	5
23	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	95.54	95.54	95.54	93.75	93.75	94.64	93.75	96.43	95.54	94.94	A	Sangat Baik	28
24	Stasiun KIPM Bengkulu	95.24	92.86	96.43	95.24	96.43	95.24	94.05	94.05	94.05	94.84	A	Sangat Baik	21
25	Stasiun KIPM Medan II	95.33	95.00	94.00	96.00	94.33	94.67	94.33	94.67	94.33	94.74	A	Sangat Baik	75
26	Stasiun KIPM Bau-Bau	95.45	93.18	95.45	95.45	95.45	93.18	95.45	95.45	93.18	94.70	A	Sangat Baik	22
27	Stasiun KIPM Kupang	95.04	94.86	94.68	93.44	94.68	94.68	94.33	95.04	94.15	94.54	A	Sangat Baik	141
28	Balai KIPM Manado	94.55	94.09	95.00	96.36	95.45	92.27	94.09	94.09	92.73	94.29	A	Sangat Baik	55
29	Balai KIPM Tarakan	94.50	96.00	95.00	94.50	94.50	93.50	93.00	91.50	93.50	94.00	A	Sangat Baik	50

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
30	Stasiun KIPM Cirebon	93.75	93.36	94.14	94.92	94.14	92.97	93.75	94.14	93.75	93.88	A	Sangat Baik	64
31	Stasiun KIPM Kendari	95.54	95.54	93.75	94.64	92.86	91.96	95.54	91.96	92.86	93.85	A	Sangat Baik	28
32	Balai Uji Standar KIPM	95.19	94.23	94.23	94.23	94.23	92.31	92.31	92.31	95.19	93.80	A	Sangat Baik	26
33	Balai KIPM Denpasar	92.76	93.28	93.45	93.10	93.10	93.79	93.62	94.14	94.14	93.49	A	Sangat Baik	145
34	Stasiun KIPM Palembang	89.22	96.57	85.29	98.53	96.81	84.56	93.87	98.53	97.30	93.41	A	Sangat Baik	102
35	Balai Besar KIPM Makassar	93.25	93.10	91.84	93.92	93.43	91.62	92.32	93.51	92.54	92.84	A	Sangat Baik	674
36	Stasiun KIPM Batam	95.12	96.95	95.12	96.34	95.73	90.24	82.93	96.34	85.37	92.68	A	Sangat Baik	41
37	Stasiun KIPM Bandung	94.57	91.30	91.30	94.57	94.57	92.39	88.04	91.30	92.39	92.27	A	Sangat Baik	23
38	Stasiun KIPM Yogyakarta	92.11	93.42	86.84	92.11	93.42	89.47	94.74	94.08	93.42	92.18	A	Sangat Baik	38
39	Stasiun KIPM Bima	94.74	96.05	90.79	88.16	89.47	90.79	93.42	93.42	90.79	91.96	A	Sangat Baik	19
40	Balai KIPM Semarang	91.38	91.38	91.09	91.95	91.09	88.79	89.37	92.24	90.23	90.84	A	Sangat Baik	87
41	Balai Besar KIPM Jakarta I	94.70	89.77	88.26	90.15	88.64	90.15	88.64	90.91	91.67	90.32	A	Sangat Baik	66
42	Balai KIPM Lampung	89.38	93.75	86.88	90.00	88.13	88.75	91.25	91.25	89.38	89.86	A	Sangat Baik	40
43	Stasiun KIPM Palangkaraya	92.86	92.86	88.10	86.90	91.67	88.10	89.29	90.48	88.10	89.81	A	Sangat Baik	21
44	Balai KIPM Surabaya I	91.10	89.41	89.83	91.31	90.47	88.14	88.35	89.41	88.98	89.67	A	Sangat Baik	118

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
45	Stasiun KIPM Mamuju	88.89	91.67	88.89	86.11	86.11	91.67	88.89	88.89	91.67	89.20	A	Sangat Baik	9
46	Stasiun KIPM Aceh	88.75	91.25	90.00	90.00	91.25	86.25	86.25	87.50	87.50	88.75	A	Sangat Baik	20
47	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	87.11	86.84	86.84	86.84	86.84	86.84	86.58	100.00	86.58	88.27	B	Baik	95

Hasil Pelaksanaan SKM Berdasarkan Produk Layanan BPPMHKP

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Kualitas Air	271	3,72	3,87	3,68	3,83	3,83	3,65	3,79	3,87	3,78	94,51	A	Sangat Baik
2	Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	1	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik
3	Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif	8	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,75	3,75	3,75	4,00	97,92	A	Sangat Baik
4	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik	39	3,85	3,85	3,79	3,79	3,79	3,79	3,74	3,82	3,64	94,66	A	Sangat Baik
5	Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik	5	3,40	3,80	4,00	3,60	3,80	3,40	3,80	4,00	3,20	91,67	A	Sangat Baik
6	Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik	29	3,86	3,79	3,79	3,72	3,72	3,62	3,59	3,79	3,83	93,68	A	Sangat Baik
7	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik	4	3,75	3,75	3,75	4,00	4,00	3,75	3,75	3,75	3,75	95,14	A	Sangat Baik
8	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik	8	3,63	3,50	3,63	3,38	3,50	3,38	3,38	3,63	3,50	87,50	B	Baik
9	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	107	3,80	3,75	3,77	3,79	3,78	3,74	3,82	3,80	3,67	94,21	A	Sangat Baik

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
10	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	225	3,67	3,64	3,56	3,68	3,67	3,61	3,60	3,66	3,62	90,90	A	Sangat Baik
11	Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	9	3,67	3,67	3,56	3,33	3,56	3,33	3,56	3,67	3,67	88,89	A	Sangat Baik
12	Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk Pengeluaran dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	2092	3,83	3,82	3,81	3,83	3,82	3,79	3,78	3,84	3,78	95,30	A	Sangat Baik
13	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	539	3,75	3,72	3,68	3,71	3,71	3,62	3,67	3,79	3,67	92,54	A	Sangat Baik
14	Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (Approval Number)	25	3,88	3,80	3,80	3,88	3,84	3,84	3,84	3,88	3,84	96,11	A	Sangat Baik
SELURUH LAYANAN BPPMHKP		3362	3.80	3.80	3.76	3.79	3.79	3.73	3.75	3.82	3.75	94.42	A	Sangat Baik